

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada dasarnya Australia–Indonesia adalah negara tetangga. Indonesia merupakan negara terpenting bagi Australia. Sebagai sebuah negara kepulauan yang besar, Indonesia juga memiliki tingkat populasi yang cukup tinggi. Terletak antara samudera Hindia dan Pasifik dengan posisi strategis yang menghubungkan Australia dengan negara-negara Asia, Indonesia menempati posisi strategis bagi Australia di bandingkan dengan negara-negara Asia yang lainnya karena letak yang saling berdekatan. Takdir geografis ini tidak pernah bisa ditolak, selain kedua negara ini harus mampu menciptakan hubungan yang sehat serta dapat menjamin kestabilan kawasan kedua negara tersebut.

Australia dan Indonesia sangat berdekatan. Faktor tersebut mempengaruhi eksistensi hubungan kedua negara yang khas. Dengan masing-masing kepentingan nasionalnya, kedua negara membangun suatu hubungan yang penuh dinamika dari waktu ke waktu.

Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia-Australia dari dulu sampai saat ini tentu saja di pengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah perbedaan budaya, kurangnya pemahaman budaya politik masing-masing negara dan prioritas-prioritas kebijakan politik baik dalam dan luar negeri kedua negara tersebut sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Indonesia-Australia

Hubungan politik Indonesia dan Australia sudah lama menjadi duri dalam daging yang sulit dilupakan terutama jika dikaitkan dengan campur tangan Australia dengan kebijakan politik Indonesia terutama dikaitkan dengan hak asasi manusia. Sebelum Timor Timur berpisah dengan Indonesia, pemerintah Australia mengkampanyekan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur dan kampanye tersebut menjadi peluang empuk bagi insan pers untuk dijadikan komoditi bisnis pers yang menguntungkan pemerintah Australia. Di satu sisi pemerintah Indonesia sulit untuk menetralsir berita yang negatif, sebab oknum-oknum yang berasal dari Timor Timur turut pula mendiskreditkan pemerintah Indonesia dengan demikian dunia internasional semakin yakin bahwa pemerintah Indonesia memang telah melakukan hal yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia.

Ketika Australia memberikan suaka politik kepada 42 warga negara Indonesia asal Papua pada bulan Februari 2006, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana intervensi Australia terhadap situasi politik domestik Indonesia. Alasan permintaan suaka politik dari 42 warga Papua kepada pemerintah Australia berkaitan dengan tertembaknya seorang warga Papua serta “*genocida*” atau pembersihan etnis. Dari ke 42 warga Papua tersebut sembilan diantaranya diduga keluarga besar Wanggay, yang selama ini sering mengkampanyekan kemerdekaan Papua.¹ Pemerintah Indonesia marah terhadap Australia karena mencampuri urusan dalam negeri soal Papua.

¹ Dedi Setiawan, Suaka Politik Warga Papua Merusak Hubungan RI dan Australia, dalam <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006110590>

Bentuk kemarahan pemerintah Indonesia itu ditandai penarikan duta besarnya, Teuku Mohammad Thayeb dari Australia.

Untuk itu penulis mengambil judul skripsi “Keterlibatan Elemen-Elemen di Australia dalam kasus Upaya Separatisme Papua”. Penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah Australia tetap mendukung sepenuhnya Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun beberapa elemen di Australia mendukung upaya kemerdekaan Papua.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu

1. Menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang ada kemudian membuktikan hipotesa dengan fakta dan data.
2. Memperbanyak bahan-bahan kajian kuliah yang sesuai dengan mata kuliah Politik dan pemerintah Australia.
3. Untuk mengetahui sikap dan keterlibatan elemen-elemen di Australia terhadap upaya separatisme Papua.

C. Latar Belakang Masalah

Upaya separatisme Papua dari integritas Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kronologis status dan posisi Irian Barat dalam konteks awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi. Salah satunya adalah Irian Jaya. Pada saat itu,

Irian Jaya masih diduduki oleh Belanda. Dan pihak Indonesia pun berupaya merebutnya dengan menyerukan misi Pengembalian Irian Jaya.

Keterlambatan integrasi Irian Jaya tersebut memberikan kesempatan bagi tumbuhnya nasionalisme Papua dan keinginan untuk memerdekakan diri. Dorongan ini dikarenakan Irian Jaya hanya menjadi sengketa tanpa memperoleh perhatian kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga keinginan untuk menentukan nasib sendiri itulah yang menjadi aspek dasar politis dari separatisme Papua.

Para pro kemerdekaan juga merasa dikecewakan oleh Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, pemerintah Belanda menjanjikan pada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara (boneka) Papua yang terlepas dari Republik Indonesia. Beberapa pemimpin putra daerah yang Pro-Belanda mengharapkan akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam Negara Papua tersebut. Janji pemerintah Belanda tersebut tidak dapat terealisasi sebab Irian Jaya harus diserahkan kepada Indonesia melalui perjanjian New York 1962. Walaupun dalam perjanjian itu terdapat pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, namun pelaksanaannya diserahkan kepada Indonesia dan disaksikan oleh pejabat PBB. Namun dalam perjalanannya, pada tahun 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB, sehingga dukungan PBB tidak dapat diharapkan lagi.

Terlepas dari cara apapun yang pernah dilakukan oleh PBB dan Indonesia dalam proses penyatuan kembali Irian Barat kepada Indonesia,

proses politik dari sisi internasional sudah selesai. Pada Juli-Agustus 1969 di Papua diadakan Referendum 1969 atau penentuan Pendapat rakyat (Pepera). Pada sidang Umum PBB (September-Oktober 1969), Amerika Serikat mendukung hasil Pepera yang menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Papua memilih integrasi dengan Indonesia. Kemudian dikukuhkan PBB melalui Resolusi 2504 tanggal 19 November 1969. Sejak itulah terdapat pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia yang mencakup Papua.

Namun perjuangan bagi kemerdekaan Papua tetap eksis. Organisasi-organisasi tetap pada keinginan awal yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya terlepas dari pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Contoh organisasi gerakan di bawah tanah yang muncul di Irian Jaya seperti di Jayapura muncul "Gerakan Menuju Kemerdekaan Papua Barat".² Gerakan ini timbul pada tahun 1963 yang di pelopori oleh Asder Demotekay, mantan kepala distrik Demta Kabupaten Jayapura. Kemudian tahun 1964 di Manokwari muncullah suatu gerakan politik yang di beri nama "Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat".³ Oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak keamanan dan kejaksaan menamai gerakan itu sebagai "Organisasi Papua Merdeka" (OPM).

Sejak itulah terus muncul berbagai pemberontakan, baik politis maupun bersenjata, dari OPM. Pemberontakan demi pemberontakan berjalan terus hingga dekade 1990-an. Dan momentum baru muncul ketika

² <http://www.papua.go.id/kemerdekaan.php>

³ Organisasi Papua http://www.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka

pemerintahan Orde Baru berakhir dan tiba era reformasi. Tekanan untuk kemerdekaan Papua Barat di era tersebut semakin menguat. Protes massal merebak setelah pemerintah pusat yang baru di bawah Presiden Habibie mengumumkan kebijakan membagi wilayah tersebut menjadi tiga propinsi. Mereka menganggap kebijakan tersebut tidak lain sebagai upaya pemerintah Indonesia memecah belah rakyat Papua Barat dan melemahkan perjuangan kemerdekaan. Terlaksananya jajak pendapat di Timor-Timur juga ikut menyulut sentimen yang mempertinggi tuntutan kemerdekaan di Papua Barat. Sementara itu, di dunia internasional, suatu kampanye tengah dilakukan guna mempengaruhi masing-masing pemerintahan untuk menerima kenyataan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tiga puluh tahun sebelumnya merupakan kebohongan besar.

Sejak berakhirnya pemerintahan Soeharto, sebenarnya sudah terdapat suatu pengakuan di Jakarta terhadap kebutuhan menjawab aspirasi rakyat Papua Barat untuk merdeka. Pengakuan itu terwujud dalam bentuk kegiatan "Dialog Nasional" yang menjanjikan suatu diskusi terbuka tentang berbagai masalah yang ada di Papua Barat. Selain itu, bagi pemerintah Jakarta, ketidakpuasan di Papua Barat serta di wilayah lainnya mengilhami lahirnya undang-undang baru tentang "Otonomi Daerah dan Keseimbangan Fiskal". Tetapi ternyata undang-undang tersebut tidak cukup ampuh meredam tuntutan kemerdekaan yang terus berkejolak.

Hampir tiga dekade setelah pemerintah Indonesia berpikir bahwa mereka telah membebaskan orang-orang Papua, mereka dihadapkan pada kebangkitan kembali dan transformasi yang kuat dari gerakan nasionalis Papua. Kebangkitan Papua diikuti oleh pengunduran diri Soeharto yang dipaksakan pada Mei 1998, dan keberhasilannya menjadi tolok ukur kegagalan kebijakan Soeharto. Hal ini terjadi bersama dengan perjuangan banyak orang Indonesia untuk menciptakan sebuah politik yang lebih terbuka, pluralis dan kompetitif. Presiden Habibie menerima 100 orang delegasi pemimpin Papua pada bulan Februari 1999, segera setelah ia mengumumkan bahwa Timor Timur akan diberi pilihan untuk menjadi daerah otonomi Indonesia atau merdeka. Tuntutan Papua sudah jelas. Mereka menuntut kemerdekaan dan ingin mencapainya melalui dialog damai dengan pemerintah Indonesia.

Presiden Habibie tidak memberikan reaksi formal pada pertemuan tersebut. Pemerintah Indonesia telah terbiasa dengan tuntutan separatis untuk merdeka, tetapi tidak demikian dengan kelompok-kelompok yang bereharap dapat mencapainya melalui negoisasi damai. Kampanye Papua begitu canggung karena terjadi bersamaan dengan proses demokratisasi Indonesia sendiri. Habibie dan para penerusnya telah berhadapan dengan dilema seberapa banyak ekspresi kebebasan itu kemudian digunakan untuk membela dan memobilisasi dengan baik dukungan yang meluas bagi kemerdekaan Papua.

Penerus Habibie, Abdurrahman Wahid, presiden Indonesia yang pertama kali terpilih secara demokratis, mencari cara untuk menyelesaikan dilema tersebut dengan berusaha mengakomodir aspirasi Papua di dalam Indonesia. Ia mengubah nama propinsi tersebut dari Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan bendera bintang kejora dikibarkan. Walaupun demikian, Wahid menegaskan bahwa tugasnya sebagai presiden adalah untuk membela integritas wilayah Indonesia. Setelah kunjungan ke Papua untuk merayakan tahun baru 2000, Wahid menjaga dialog alternatif dengan para pemimpin Papua. Ia memberikan sumbangan dana pada kongres Presidium Papua. Presidium menganggap diri mereka telah menerima mandat dari kongres untuk meneruskan agenda perjuangan untuk kemerdekaan.

Kongres juga menjadi titik tolak kebijakan Indonesia terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Akomodasi Wahid atas aspirasi Papua menjadi fokus kririk Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2000. Perjanjian Presiden untuk mengubah nama propinsi menjadi Papua dan ijin yang diberikan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora ditolak. Ia kemudian diberi tugas untuk mengambil tindakan tegas melawan separatisme dan menerapkan otonomi khusus atas Papua.

Penerapan otonomi khusus ternyata tidak memuaskan banyak pihak di Papua. Organisasi Papua Merdeka tetap berupaya untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suara pro kemerdekaan merasa mewakili rakyat Papua yang telah secara besar-besaran terkesploitasi hasil buminya demi bangsa Indonesia, sementara rakyat Papua Barat tetap miskin

dan terbelakang. Rakyat Papua juga tidak mudah melupakan begitu saja tekanan-tekanan militer terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal integrasi hingga saat ini. Untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat, OPM aktif mencari dukungan politik ke luar negeri selain aktivitasnya di dalam negeri (Irian Jaya). Pencarian dukungan ke luar negeri ini seperti dilakukan OPM sejak tahun 1951. Tujuan OPM terutama untuk mencari dukungan politik dan mencari dukungan senjata atau bantuan persenjataan .

Isu separatisme Papua kemudian ternyata telah menjadi isu internasional yang tidak hanya eksklusif menjadi kepentingan domestik Indonesia. Alasan telah terjadinya pelanggaran HAM menjadikan konflik domestik menjadi isu kemanusiaan. Segera setelah lepasnya Timor-timur, mantan Menlu RI, Ali Alatas, menyatakan bahwa doktrin intervensi kemanusiaan memungkinkan baik kekuatan luar untuk mengeksploitasi konflik internal bagi kepentingan politik mereka sendiri maupun elemen-elemen di dalam Indonesia untuk menciptakan krisis demi mencari perhatian internasional dan membangkitkan intervensi. Posisi internasional Indonesia berkaitan dengan Papua, cukup sulit sejak intruksi Presiden dikeluarkan mengenai otonomi khusus.

Sehubungan dengan adanya kekhawatiran tentang kesatuan dan integritas teritorial telah terbentuk kekhawatiran tentang campur tangan internasional. Setidaknya, keterlibatan sejumlah pihak Australia di Papua. Hal ini dapat dilihat ketika Australia memberikan suaka politik kepada 42 warga

negara Indonesia asal Papua pada bulan Februari 2006, sehingga timbul pertanyaan mengenai sejauh mana intervensi Australia terhadap situasi politik domestik Indonesia. Kasus pemberian suaka tersebut menjadi penting dengan berkaca ke belakang kepada peristiwa lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1999 lalu, sehingga kecurigaan terhadap intervensi Australia dalam kasus upaya kemerdekaan Papua cukup beralasan.

Adalah menjadi suatu fakta yang bertentangan ketika di satu sisi Australia menyatakan diri untuk berkomitmen membantu Indonesia dalam mempertahankan integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain tindakan-tindakan yang dilakukan beberapa elemen di Australia bertentangan dengan komitmen tersebut. Peran Australia terhadap lepasnya Timor Timur cukup melandasi alasan munculnya kecurigaan terhadap *movement-movement* Australia berkaitan dengan upaya kemerdekaan Papua.

Setelah masalah Timor Timur mereda, hubungan Jakarta-Canberra kembali memanas ketika pihak imigrasi Australia memberikan visa terhadap 42 warga Papua. Pemberian visa didasarkan atas pertimbangan legal-formal di mana Australia menganggap 42 orang tersebut adalah pengungsi yang melarikan diri akibat tindakan represif aparat keamanan di tempat asalnya. Pemerintah Australia menggunakan faktor kemanusiaan sebagai justifikasi pemberian visa.

Sebaliknya, bagi Indonesia, 42 orang tersebut merupakan anggota kelompok separatis yang sedang melakukan black campaign terhadap RI

dengan menggunakan isu pelanggaran HAM, genosida, dan seterusnya. Selain itu, penggunaan alasan kemanusiaan patut dipertanyakan karena pada 2001, Australia pernah menolak sedikitnya 430 warga imigran Afganistan yang baru saja diselamatkan kapal Norwegia.⁴

Berkaca dari kasus lepasnya Timor Timur dari wilayah kedaulatan Indonesia, tidak dipungkiri bagi Indonesia menimbulkan persepsi negatif atas campur tangan pihak-pihak Australia terhadap dukungannya untuk mengupayakan kemerdekaan bagi Timor-Timur. Sikap sejumlah pihak di Australia yang bertentangan menimbulkan kecurigaan akan kebijakan-kebijakan luar negeri Australia yang ambigu. Dalam kasus Timor Timur, pada tanggal 12 Januari 1999 menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengatakan bahwa Australia mendukung penentuan nasib (*self-determination*) bagi rakyat Timor-Timur. Namun, Downer juga menekankan bahwa Australia tetap mengakui kedaulatan Indonesia di Timor Timur.⁵

Maka kemudian, pada 27 Januari 1999, Presiden Habibie menawarkan kepada rakyat Timor Timur untuk memilih status otonomi luas atau menolak yang berkonsekuensi berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Ali Alatas, keputusan tersebut berawal dari disposisi Presiden Habibie, menyusul datangnya surat dari PM Australia John Haword.. Dalam suratnya PM Australia itu mengusulkan agar pemerintah

⁴ *Ibid*

⁵ Hubungan Indonesia-Australia Paska Jejak Pendapat Di Timor timur, dalam <http://www.google.co.id/hl=id?&q=kebijakan+luar+negeri+Australia+thd+timtim&btnG=Telusuri+dengan+google&meta=cr%3DcountryID>

Indonesia memberikan hak kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.

Antara “perubahan bersejarah” pemerintah Australia terhadap masalah Timor Timur dengan “perubahan bersejarah” pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Timor Timur sangat bedekatan waktunya. Tampaknya pemerintah Australia mempunyai perhatian khusus terhadap masalah Timor Timur, sehingga beberapa kebijakannya dari waktu ke waktu menunjukkan betapa negeri Kanguru tersebut mempunyai “*nation interest*” bahkan beberapa kebijakannya sering merepotkan pemerintah RI, meski Canberra adalah sahabat baik Jakarta.

Kebijakan Pemerintah Habibie menawarkan dua opsi, meskipun banyak dipuji oleh masyarakat internasional, namun tak sedikit mendapat kritik dari dalam negeri. PM Australia John Haword bahkan mengklaim perubahan Jakarta tersebut karena kesuksesan diplomasinya. “Adalah surat saya (kepada Presiden B.J Habibie) Desember 1998 yang menjadi katalisator perubahan kebijakan pemerintah Indonesia (atas Timor Timur),” ujarnya seperti dikutip kantor berita AFP pada tanggal 6 Mei 1999. “Tidak diragukan lagi di seluruh dunia bahwa pertemuan saya dengan Presiden Habibie yang melibatkan satu setengah jam diskusi dimana tak seorang lainpun hadir, menerima banyak fokus internasional,” tambah PM Howard.⁶

Bagi pemerintah Australia yang selama ini sangat bersahabat dengan Indonesia dan mendukung posisi Indonesia, kemenangan pro kemerdekaan

⁶ *ibid*

dalam jajak pendapat 30 Agustus 1999 dengan perolehan 78,5% dan 32,5% untuk pro integrasi, merupakan awal dari era baru hubungan Australia, Indonesia dan Timor Timur Merdeka.⁷ Begitu diumumkan jajak pendapat pada 4 September 1999, tuduhan ke Australia segera disampaikan sebagai salah satu biang kekalahan telak pro integrasi. UNAMET yang didominasi orang-orang dan pemerintah Australia yang paling ngotot mengirim pasukan ke Timor Timur memancing sikap antipati dari sebagian rakyat Indonesia yang kecewa Timor Timur merdeka. Australia menjadi seolah-olah musuh bersama baru bagi sebagian rakyat Indonesia (yang buta tentang sejarah dan politik Timor Timur) termasuk para mahasiswa yang berdemo membakar bendera Australia, Megawati Soekarnoputri bahkan Gus Dur memberi komentar tidak signifikan terhadap UNAMET dan pemerintah Australia.

Sehingga tidak berlebihan jika terdapat kecurigaan bahwa tidak menutup kemungkinan sejumlah pihak dan elemen di Australia akan mengambil keuntungan dari kejadian ini dan mendukung kemerdekaan Papua sebab sudah lama Australia melirik Papua sebagai provinsi yang kaya sumber alam yang sangat menguntungkan bagi perekonomian Australia, apalagi dari letak geografis Papua dan Australia cukup dekat jaraknya sehingga sangat memungkinkan bagi pemerintah Australia mengulangi pengalaman yang pernah terjadi di Timor Timur.⁸

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keputusan pemerintah Australia dalam memberikan suaka politik kepada 42 warga negara Indonesia

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

asal Papua adalah keputusan yang tidak tepat, tidak realistis dan cenderung sepihak, dalam siaran persnya pada 3 Maret 2006 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. “Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” tandas Presiden. “Apabila kita berbicara soal keadilan, harus melihat dari kedua belah pihak. Karena ini menyangkut hubungan, menyangkut isu antara Indonesia dan Australia,” imbuhnya. “Karena yang terjadi bagi Indonesia adalah bukan hanya sekedar pemberian suaka bagi pencari suaka politik. Tetapi itu berkenaan dengan sesuatu yang sangat fundamental bagi negara Indonesia, yaitu kedaulatan dan kehormatan Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara,” tandasnya.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana sikap beberapa elemen di Australia terhadap upaya separatisme Papua pada masa Perdana Menteri John Howard (1996-2007)?”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam studi ilmu-ilmu politik dan sosial, khususnya Ilmu Hubungan Internasional, teori menjadi suatu alat analisa yang sangat penting dalam rangka melihat fenomena yang terjadi. Teori merupakan pedoman yang dapat mengarah pada penelitian empiris dengan menunjuk fakta-fakta yang perlu

⁹ Kebijakan Pemerintah Australia Sepihak, dalam http://www.cyber.com/cybermq/detail_berita.php?id=948&noid=1

dianalisa agar kita dapat mengembangkan teori. Kata dasar teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”, dengan definisi sebagai suatu pandangan/persepsi tentang apa yang terjadi. Berteori adalah pekerjaan mendeskripsikan tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu bisa terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian tersebut di masa depan. Secara spesifik teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab makna pada fenomena yang terjadi. Pernyataan yang di sebut teori tersebut berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalamnya itu terdapat konsep-konsep, maka bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep, secara logis sebagai sarana untuk menjelaskan generalisasi tersebut.¹⁰

Secara spesifik MC Cain dan Segal mendefinisikan teori sebagai:

“Serangkaian statement yang berkaitan...(yang terdiri dari): 1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu; 2) kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasaritu satu sama lain; 3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa)”¹¹

Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar pemikiran yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini adalah teori persepsi yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti dan salah satu turunan teoretik dari model pengambilan keputusan (Decision Making Theory) oleh Graham T. Allison yaitu mengenai

¹⁰ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES. Jakarta, 1990, hal. 185-186.

¹¹ *Ibid*, hal. 187(dalam buku Garvin McCain dan Erwin Segal, *he Game Of Science* (Brook/Cole, 1973) hal 99)

peranan aktor-aktor domestik atau *Multiple Autonomous Group* dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri sebuah kesatuan negara. Teori atau model ini mendasarkan pada gagasan adanya rasionalitas komprehensif dari perilaku ideal, artinya mencari pilihan alternatif yang paling ideal. Dengan kata lain dalam memutuskan suatu kebijaksanaan yang paling optimal dalam artian pada hubungan sarana dan tujuannya.

1. Teori Persepsi

Menurut Kenneth Boulding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda.

Kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan ... tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta situasi yang “obyektif” ... tetapi “citra” mereka tentang situasi itu. Yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia.¹²

Jadi orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka “ketahui”. Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang “kenyataan”. Menurut **Teori Persepsi** yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti, diasumsikan bahwa:

Persepsi selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan dan lain-lain, juga mengandung keyakinan tentang suatu hal yang

¹² Mohtar Mas'oeid, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (PAU-UGM, 1989), hal. 19-20.

dianggap benar meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.¹³

Sikap elemen-elemen di Australia terhadap kasus separatisme Papua sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki terhadap isu-isu baik positif maupun negatif di Papua yang berkembang di masyarakat Australia. Snyder berpendapat dalam mendefinisikan suatu situasi obyektif yang membutuhkan keputusan sebagai antisipasi terhadap situasi tersebut, *decision – makers* sering terjebak kedalam subyektifitas.¹⁴ *Decision – makers* memandang suatu kondisi obyektif melalui sudut pandang yang tertanam di benak mereka, sehingga seringkali tidak menggambarkan kondisi obyektif sebenarnya.

Pandangan elemen-elemen di Australia terhadap isu separatisme Papua tidak lepas dari persepsi yang dimilikinya terhadap perkembangan sejarah integrasi Papua ke dalam KRI. Bagi para pendukung separatisme Papua, Indonesia merupakan pelanggar HAM serta pelaku genosida. Sehingga pada gilirannya, persepsi negatif terhadap pemerintah Indonesia tersebut menghasilkan persepsi negatif terhadap keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI.

Subyektifitas atas pemerintahan Indonesia di Papua merupakan wujud pandangan stereotipikal Barat yang mengedepankan Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Meski tidak sepenuhnya terbukti, isu pelanggaran

¹³ Ole R. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, (Third Edition Prentice-Hall, Inc., Engelwood Cliffs, New Jersey, 1977), hal. 367 dan 370

¹⁴ James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff Jr, *Contending Theories of International Relations*, J.B. Lippincot Company, hal 316

HAM dan genosida sangat mempengaruhi sikap elemen-elemen di Australia terhadap isu separatisme Papua. Persepsi yang dimiliki elemen-elemen atas keberadaan Papua di bawah pemerintahan Indonesia sangat mempengaruhi sikap terhadap gerakan separatisme Papua. Sikap para pendukung integritas Papua ke dalam NKRI yang menentang separatisme dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap kesatuan negara. Pemerintah Australia sepenuhnya tidak mendukung pemisahan diri sebuah wilayah dari suatu negara. Melalui pernyataan berbagai kalangan pemerintahan, Pemerintah Australia mendukung sepenuhnya bahwa Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kasus separatisme Papua, sikap elemen-elemen di Australia terbagi menjadi dua, yaitu mendukung separatisme Papua dan di sisi lain tidak mendukung separatisme Papua. Masing-masing pihak yang menyatakan sikap tersebut memiliki alasan persepsional masing-masing. Didasarkan pada teori persepsi, sikap mendukung dan tidak mendukung separatisme Papua memiliki dasar pertimbangan subyektif tersendiri.

2. Konsep *Multiple Autonomous Groups* (Unit Pengambil Keputusan)

Dalam analisa ini, model pengambilan keputusan digunakan untuk memberikan kerangka teoretis mengenai aktor-aktor baru selain negara di tingkat domestik yang memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Pada penulisan skripsi ini Model Pengambilan Keputusan (*Decision-Making Model*) dipergunakan sebagai

kerangka untuk mendeskripsikan kebijakan yang di tempuh elemen-elemen lokal di Australia dalam menentukan sikapnya terhadap kasus Papua.

Menurut Holsti, salah satu jenis dari teori liberalisme yang berusaha memaparkan peranan faktor-faktor domestik dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri adalah model pengambilan keputusan (*decision-making model*). Model pengambilan keputusan ini menentang negara sebagai satu-satunya aktor rasional pengambil keputusan, dengan alasan bahwa individu maupun kelompok juga peka terhadap tekanan-tekanan internasional, seperti pendapat umum, kegiatan kelompok kepentingan, ideologi, politik pemilihan serta politik birokrasi. Dengan demikian, menurut analisis *decision-making*, perilaku eksternal sebuah kesatuan negara hanya dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan proses politik yang berlangsung di tingkat domestik.¹⁵

Studi tentang faktor-faktor domestik dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri sesungguhnya sudah cukup lama berkembang. Wacana ini berkembang sebagai reaksi terhadap dominasi tradisi *realist* dalam pemahaman proses pembuatan kebijakan luar negeri yang terlalu menekankan peran negara. Snyder, misalnya, menyatakan bahwa pembuatan kebijakan politik luar negeri tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai pengambil keputusan. Pemikiran yang dikembangkan

¹⁵ Ole R. Holsti, "Theories of International Relations and Foreign Policy: Realism and Its Challengers," dikutip dalam Charles W. Kegley, Jr., "Controversies in International Relations Theory: Realism and The Neoliberal Challenge", New York: St. Martin's Press, 1995, dalam Bambang Cipto, *Tekanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 19

Snyder merupakan kritik terhadap arus kuat tradisi *realist* yang hanya menekankan pada kekuatan negara dan kepentingan nasional.¹⁶

Pendekatan *Bureaucratic Politic* yang dikembangkan Graham T. Allison memperkuat argumen faktor-faktor domestik di atas. Menurut Allison, proses pembuatan kebijakan luar negeri dilakukan oleh berbagai aktor yang masing-masing berperan sebagai pemain.¹⁷ Hubungan antaraktor secara umum digambarkan dalam proses tarik-ulur satu-sama lain (*pulling and hauling*). Kebijakan luar negeri dipahami sebagai *political outcomes*. Menurut Allison, *outcomes* bukanlah penyelesaian yang dipilih oleh para aktor, tetapi merupakan hasil dari kompromi, koalisi, dan kompetisi antaraktor. Jalan menuju tercapainya *outcomes* tersebut bersifat politik, dalam arti bahwa kegiatan tersebut berlangsung dalam situasi tawar-menawar antarpara aktor.¹⁸ Kemampuan dan keahlian dari para aktor itulah yang menentukan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan dalam konteks birokratik politik.¹⁹

Studi lain yang secara eksplisit menyebutkan peran kekuatan di luar negara dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri adalah tulisan Herman *et al.* Mereka merumuskan model pembuatan kebijakan luar negeri dalam kerangka proses pengambilan keputusan kolektif. Dalam studi

¹⁶ Charles F. Hermann and Gregory Peacock, "The Evolution and Future of Theoretical Research in the Comparative Study of Foreign Policy," dikutip dalam Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr., James N. Rosenau (eds), "New Directions in the Study of Foreign Policy", Boston: Allan and Unwin Inc., 1987, dalam *Ibid*, hal. 20

¹⁷ Graham T. Allison, "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis," dikutip dalam G. John Ikenberry (ed), "American Foreign Policy: Theoretical Essays", Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1989, dalam *Ibid*, hal. 20

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraft, Jr., "Contending Theories of International Relations," New York: HarperCollinsPublishers, Inc., 1990, dalam *Ibid*

tentang pengambilan keputusan, mereka berangkat dari asumsi bahwa wewenang untuk membuat keputusan dijalankan oleh beberapa unit pengambil keputusan (*decision units*) yang berbeda. Herman *et al* lebih lanjut berargumentasi bahwa dengan memilah-milah satuan-satuan pengambil keputusan akan diperoleh pengetahuan yang memperluas pengetahuan kita tentang perilaku sebuah kesatuan negara dalam arena kebijakan luar negeri.²⁰

Menurut Margaret Herman *et al*, pada semua kesatuan negara terhadap sekelompok aktor —*the ultimate decision unit*— yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber daya pemerintah dalam urusan luar negeri dan memiliki kekuasaan mencegah kesatuan lain dalam negara untuk mengubah posisi mereka.²¹

Multiple autonomous group adalah satuan pengambil keputusan yang terdiri dari berbagai kelompok atau koalisi yang tak seorang pun memiliki kemampuan menentukan atau memaksakan kehendaknya pada kelompok lain.²² Pada unit pengambil keputusan ini tidak ada kelompok dominan. Oleh karena itu, *multiple autonomous groups* memerlukan dukungan sebagian atau semua kelompok dalam pembuatan kebijakan luar negeri sebuah kesatuan negara. Masing-masing kelompok harus memiliki kemampuan untuk menarik dan memberikan dukungan dari dan untuk

²⁰ Margaret C. Herman, Charles F. Herman, and Joe D. Hagan, "How Decision Units Shape Foreign Policy Behavior," dikutip dalam Charles F. Herman, Charles W. Kegley Jr., James N. Rosenau (eds), "New Directions in the Study of Foreign Policy", Boston: Allan and Unwin Inc., 1987, dalam *Ibid*, hal. 21

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

kelompok lain agar sumber daya yang ada dalam negara, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat dialokasikan dalam penentuan kebijakan luar negeri.²³

Hubungan antarkelompok dalam *multiple autonomous groups* dapat bersifat *zero-sum-game* atau *non-zero-sum-game*. Dalam hubungan jenis *zero-sum-game*, masing-masing kelompok melihat kelompok lain memperoleh manfaat dengan mengorbankan kelompok lainnya. Sementara dalam jenis hubungan *non-zero-sum-game* terdapat peluang bagi munculnya kesepakatan antarkelompok.

Dengan kerangka pemikiran di atas, dapat ditelusuri bahwa terdapat kesatuan para pengambil keputusan atau *multiple autonomous groups* di Australia yang memiliki kebijakan tertentu terhadap isu yang notabene berasal dari luar Australia, yaitu isu separatisme Papua. Diakui bahwa aktor-aktor domestik Australia tersebut ikut memainkan peran dalam merespon isu-isu luar negeri.

Dalam kasus separatisme Papua, *multiple autonomous groups* atau elemen-elemen domestik di Australia memiliki sikap atau kebijakan yang heterogen. Dalam sistem politik Australia, elemen-elemen tersebut secara kasar terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah. Sikap elemen-elemen di Australia tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mendukung kedaulatan NKRI dan di sisi lain mendukung separatisme Papua. Masing-

²³ *Ibid*

masing pihak yang menyatakan sikap tersebut memiliki alasan rasional masing-masing.

Elemen pemerintah direpresentasikan oleh aktor-aktor seperti Senator, Representatif, Presiden (yang dijalankan oleh para pejabat dari *agency* [departemen atau kantor pemerintah]). Sementara elemen non-pemerintah direpresentasikan oleh institusi keagamaan (gereja), media massa/jurnalis, akademisi, pengusaha, dan LSM.

Dalam konstitusi Australia, seorang senator adalah pembuat undang-undang yang bersifat mengikat (*legislator*). Sedangkan pejabat departemen adalah eksekutif yang memiliki otoritas resmi menjalankan kebijakan publik. Sementara, kelompok kepentingan non-pemerintah lebih banyak memanfaatkan tekanan (*pressure*) dalam keikutsertaan mereka pada proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Pihak pemerintah Australia sendiri secara resmi menyatakan mendukung integrasi Papua ke NKRI. Melalui pernyataan berbagai kalangan pemerintahan, Pemerintah Australia mendukung sepenuhnya bahwa Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain, Perdana Menteri Australia John Howard mengatakan bahwa Australia juga menghargai kebebasan berpendapat dan berfikir karena hal itu merupakan bagian dari "*free of speech*". Namun jika gerakan itu sudah mengarah kepada gerakan fisik yang bersifat sparatis, maka hal

itu menjadi hal lain yang perlu ditindaklanjuti secara tegas.²⁴ Howard mengatakan negerinya tetap mendukung keutuhan Indonesia. Jika ada orang yang mengatakan mendukung Papua merdeka, itu bukan pernyataan pemerintah, namun itu lebih kepada pernyataan individu semata.

Perdana Menteri John Howard menegaskan, Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan tidak mendukung gerakan separatis Papua ataupun wilayah lain di Indonesia. "Kami percaya bahwa masa depan Papua ada di tangan RI. Implementasi semua aspek dalam pembangunan, pendidikan, HAM, dan aspek-aspek otonomi," tegas Howard.²⁵

Duta Besar (Dubes) Australia untuk Negara Indonesia Mr. David Ritchie menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan Australia terhadap Papua sudah jelas dan pasti, yakni sangat mendukung Papua menjadi bagian integrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁶

Atase Pers Kedutaan Besar Australia Elizabeth O'Neal menyatakan sikap resmi Pemerintah Australia adalah tidak mendukung kemerdekaan Papua. "Kebijakan Pemerintah Australia tidak mendukung

²⁴ Australia Dukung Papua Bagian NKRI, <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=2321> Senin, 17 Februari 2003

²⁵ Howard: Australia Mengakui Kedaulatan RI atas Papua, *Suara Pembaruan*, 28 Juni 2006

²⁶ Australia Tak Dukung Separatis di Papua, http://www.melanesianews.org/spm/publish/printer_695.shtml May 26, 2005

Papua Merdeka karena Australia percaya bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia," ujarnya.²⁷

Di kalangan legislatif, Ketua Delegasi Parlemen Australia Peter Slipper mengatakan bahwa mayoritas anggota Parlemen Australia tidak mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bercita-cita untuk melepaskan diri dari Indonesia. "Mayoritas anggota Parlemen Australia mendukung keutuhan wilayah RI. Kami juga menyampaikan bahwa sikap Pemerintah Australia tetap mendukung integritas wilayah Indonesia," kata Slipper.²⁸ Pernyataan dari kalangan legislatif ini mengindikasikan bahwa pemerintah Australia tetap berupaya mempertahankan hubungan bilateral dengan Indonesia di tengah isu separatisme Papua. Pihak legislatif Australia memandang Indonesia sebagai negara tetangga yang penting sehingga kerjasama kedua negara baik di bidang ekonomi maupun politik perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Alasan pemerintah Australia untuk mendukung integritas NKRI lebih disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan keharmonisan hubungan bilateral antar negara. Australia di satu sisi tidak ingin membuka konflik dengan Indonesia dengan mendukung gerakan separatis Papua. Australia menginginkan hubungan bilateral kedua negara dapat berjalan dalam kerangka saling menghargai dan menghormati. PM John Howard sendiri menyatakan bahwa semangat Australia dan Indonesia adalah untuk mencari format kerja sama yang lebih baik dan efektif untuk menghadapi

²⁷ Australia Tidak Mendukung Papua Merdeka, www.Tempointeraktif.com, 21 Maret 2006

²⁸ Australia Tak Dukung Organisasi Papua Merdeka, dpr.go.id, 19 September 2006

masalah separatisme dengan mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.²⁹

Selain sikap pemerintah, legislatif, dan duta besar tersebut di atas yang mendukung integritas NKRI, ada banyak pihak yang mendukung bagi upaya separatisme Papua. Dari kalangan eksekutif, Senator dari Partai Hijau di Australia, Bob Brown, menyatakan mendukung gerakan separatisme Papua. Brown mendesak Pemerintah Australia untuk mendukung kemerdekaan bagi Papua. Di saat pemerintahan PM John Howard mendukung integritas NKRI demi terjaganya hubungan bilateral Indonesia-Australia, Brown justru menginginkan agar Pemerintah Australia untuk mendukung kemerdekaan Papua. “Kini waktunya pemerintahan ini memiliki inisiatif untuk menyikapi hak Papua Barat untuk memiliki hak menentukan nasibnya sendiri kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Brown.³⁰

Terhitung terdapat kelompok LSM dan senator yang ikut mendukung gerakan separatis di Papua. Berbagai kampanye Papua merdeka juga kerap difasilitasi kelompok-kelompok tersebut. Disinyalir memang ada keterkaitan antara gerakan separatis di Papua dan Persekutuan Gereja Australia (*Uniting Church in Australia*). Organisasi ini memanfaatkan jaringan gereja dalam kampanye pro kemerdekaan Papua.³¹

Selain itu, dalam pemberian visa sementara bagi 42 warga Papua,

²⁹ Australia Tidak Mendukung Papua Merdeka, www.Tempointeraktif.com, 21 Maret 2006

³⁰ PM Howard Didesak Dukung Papua Merdeka, http://www.sinarharapan.co.id/luar_negeri/index.html, Sabtu, 25 Maret 2006

³¹ Australia Embuskan Genosida Papua <http://www.freelists.org/archives/ppi/04-2006/index.html> Rabu, 19 April 2006

Persekutuan Gereja juga mendukung dengan alasan telah terjadi genosida (pembunuhan untuk menghilangkan etnis) di Papua.

Mayoritas kelompok-kelompok di Australia mendukung pemberian suaka kepada warga Papua tersebut. Juga terdapat keterlibatan tokoh-tokoh politik Australia dalam gerakan separatis Papua, misalnya Natasha Despoja (Partai Demokrat), Bob Brown (Green Party), dan Greg Sword (Partai Buruh).³² Juga ada peneliti, aktivis kampus, hingga redaktur majalah.

Pers di Australia juga cenderung untuk memojokkan pemerintah Indonesia dalam permasalahan di Papua. Dalam salah satu tulisannya di *The Age*, 13/4/2006, wartawan Australia John Martinkus menulis pada 2003 saat dirinya berkunjung ke Papua, "The intimidation and attacks on human rights workers by the Indonesian military and the outrage of the West Papuan leaders." Peristiwa itu berkaitan dengan akan diberlakukannya otsus Papua 2001. Dalam tulisan Martinkus, seperti halnya di Aceh dan Maluku, daerah-daerah tersebut sangat rawan karena genosida masih terus berlangsung.³³

Kecenderungan pihak-pihak di atas untuk mendukung kemerdekaan Papua dari NKRI lebih disebabkan oleh merebaknya isu HAM di kalangan LSM dan pemerintah. Isu HAM memang saat ini menjadi senjata yang ampuh untuk menekan sebuah kebijakan. Hal ini tampak pada Kampanye Hitam terhadap Indonesia yang terus dilakukan

³² *Ibid*

³³ Baiq L.S.W. Wardhani, Genosida di Papua?, dalam <http://www.freelists.org/archives/ppi/04-2006/msg00334.html>

oleh kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua Barat melalui iklan televisi di Australia dengan mengusung wacana tudingan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) oleh TNI di Irian Jaya pada masa lalu

Kampanye hitam melalui iklan televisi yang disokong Pengusaha Australia, Ian Malrose, dan melibatkan Clemens Runawery dan Hugh Lunn terus-menerus ditayangkan Stasiun TV “Channel 10”.³⁴ Dalam kampanye hitam yang diusung kelompok seperti “Free West Papua Action for Human Rights in Papua” dan melibatkan orang Papua dan warga Australia putih sebagai sosok dalam iklan untuk meminta dukungan rakyat Australia memerdekakan Papua seperti yang telah dilakukan di Timor Timur.

Selain kampanye hitam yang terus menerus dilakukan melalui iklan televisi, Maret lalu, Proyek Papua Barat Pusat Kajian Perdamaian dan Konflik Universitas Sydney juga menerbitkan laporan bertajuk “Blundering In: The Australia-Indonesia Security Agreement and the Humanitarian Crisis in West Papua.”³⁵ Laporan yang antara lain disusun oleh Prof.G.Peter King dan Dr.Jim Elmslie, yang dinilai sejumlah kalangan di Tanah Air sebagai akademisi partisan dan sangat pro-kemerdekaan Papua itu, pada intinya mempersoalkan artikel 2.3 dalam perjanjian yang dipandang penulisnya dapat menghambat apa yang mereka sebut hak demokrasi rakyat Australia untuk menyuarakan dukungannya pada kemerdekaan Papua dari Indonesia.

³⁴ Kampanye Hitam Terhadap Indonesia Terus Ditayangkan Lewat Iklan TV Di Australia, dalam <http://beritasore.com/about/> Mei 14th, 2007

³⁵ *Ibid*

F. Hipotesa

Dari pembahasan di atas dapat di kemukakan bahwa elemen-elemen di Australia memiliki sikap yang berbeda terhadap upaya separatisme Papua yaitu:

1. Mendukung Separatisme Papua.
2. Menolak Separatisme Papua.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian atau penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga nantinya pembahasan tidak mengalami perluasan, yang bisa menyebabkan hasil dari penulisan karya ilmiah menjadi rancu, kurang fokus dan kurang ilmiah.

Oleh karena itu, penulis dalam karya ilmiah ini membatasi pada topik yang diangkat oleh penulis, yaitu perbedaan sikap elemen-elemen di Australia mengenai isu separatisme Papua pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard (1997-2007). Penulis mengidentifikasi sikap elemen-elemen di Australia mengenai isu separatisme pada tingkat analisa individu dan kelompok individu yang ada di Australia

Namun tidak menutup kemungkinan digunakan data-data yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan di luar pembahasan tersebut yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini, apabila hal itu masih ada relevansinya dengan apa yang di kemukakan oleh penulis.

H. Metode Penulisan

Agar penelitian skripsi ini menjadi terarah dan sesuai dengan criteria keilmuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder.³⁶

2. Sumber Data

Studi ini adalah penelitian data kepustakaaan, yang meneliti data sekunder. Dalam hal ini terdapat tiga macam data sekunder, yang menjadi sumber data yaitu:

- a. sumber data primer yaitu: sumber-sumber yang memounyai kekuatan mengikat seperti ilmu hubungan internasional.
- b. Sumber data sekunder yaitu: sumber-sumber yang terkait engan bahan primer seperti literatur lain nyang erat kaitan dengan bahan primer.
- c. Sumber data tersier yaitu: sumber data yang memberi informasi tentang sumber data primer dan sumber data sekunder seperti ensiklopedia, kamus politik, artikel-artikel, dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang paling penting dalam meneliti. Metode pengumpulan data, penyusunan skripsi ini di laksanakan dengan metode literatur atau kepustakaan yang objek utamanya buku-buku

³⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pelajar Offset, Jakarta, 1999, hal 1

tentang hubungan Australi-Indonesia, buku-buku tentang Papua dan gerakan-gerakan Papua merdeka. Dan literatur lainnya seperti majalah, Koran, jurnal, artikel-artikel, dan *down load* internet yang relevan yang berkaitan dengan pokok permasalahannya.³⁷

4. Teknis analisa data

Setelah data-data bersifat kualitatif yang diperlukan terkumpul, penyusunan mengadakan analisa kualitatif dengan pola sebagai berikut:

a. Induktif yaitu: bermula dari fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

5. Deduktif yaitu: metode yang digunakan dengan cara membawa data yang bersifat umum menuju kerangka pembahasan yang bersifat khusus.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pengantar yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penulisan, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan,

Bab II membahas tentang aktor-aktor atau unit pengambil keputusan apa saja yang terdapat di Australia. Untuk memudahkan, unit-unit pengambilan keputusan yang ada di Australia dibagi menjadi dua, yaitu unsur pemerintah dan non-pemerintah.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, cet vii, 1991, hal 185

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, cet xxiv, hal 36

Bab III membahas tentang sejarah upaya kemerdekaan Papua, dan dukungan terhadap upaya kemerdekaan Papua. Pada bab ini juga akan membicarakan tentang dinamika hubungan Indonesia-Australia, terutama dalam konteks kasus separatisme Papua.

Bab IV akan menjabarkan mengenai kebijakan yang diambil oleh elemen-elemen di Australia terhadap kasus Papua. Sikap tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mendukung separatisme dan menolak separatisme.

Bab V berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.